

NASIONALISASI PABRIK GULA WATOETOELIS TAHUN 1958

Widiyah Ditha Prawesti

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: Widiyah.asiteru@yahoo.com

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Pemulihan perekonomian ini dapat dilakukan dengan cara merubah sistem perekonomian Indonesia yang sejak tahun 1950an yang telah menggunakan sistem perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Kondisi seperti itu dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan status perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi hak milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perekonomian Indonesia.

Proses nasionalisasi terjadi sejak tahun 1951 yaitu pada tahun 1951-1955 pemerintah telah merencanakan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan membentuk Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI), Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP). Kemudian pada tahun 1956-1957 terjadi kondisi yang sangat buruk yaitu adanya ketegangan yang diakibatkan oleh kaum buruh yang memberontak agar nasionalisasi segera dilakukan dengan cara melakukan aksi mogok 24 jam. Salah satu cara yang paling fenomenal dan yang paling fundamental adalah pengambilalihan semua perusahaan gula milik asing pada bulan Desember 1957. Namun baru tahun 1958 pemerintah telah mengundang-undangan secara sah. Perkembangan perusahaan setelah dinasionalisasi mengalami perubahan manajemen. Pada setiap tahunnya mengalami penurunan dalam produksinya. Namun disisi lain dengan adanya nasionalisasi kehidupan masyarakat setempat mengalami kemajuan karena adanya banyak lapangan pekerjaan akibat ditinggalkannya para pegawai Belanda.

Kata kunci : Nasionalisasi, Pabrik Gula.

Abstract

Nationalization is a constitute of process of Indonesian economic recovery. The economic recovery can be done by changing the system of the Indonesian economy since the 1950s that has been using the colonial economic system into the national economy. Such conditions can be realized by changing the status of the Dutch-owned companies will be owned by the Indonesian people fully. This is because the companies that make significant contributions to the progress of the Indonesian economy.

process of nationalization occurred since 1951, namely in 1951-1955 the government had planned to nationalize the Dutch companies, and the establishment of a Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI), Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP). Then in 1956-1957 occurred very poor condition, namely the existence of tensions caused by workers who rebelled that nationalization be done by way of a 24-hour strike. One of the most phenomenal and most fundamental is the takeover of all foreign-owned sugar company in December 1957. But in 1958 the new government has invited legally legislated. Development of nationalized companies after management changes. At the annual decline in production. On the other hand with the nationalization of local community life is progressing because of the many jobs left due Dutch officials abandoned.

Key words: Nationalization, Sugar Factory.

PENDAHULUAN

Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo merupakan warisan kolonial yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Pabrik tersebut berada di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Hampir di seluruh Jawa

Timur terdapat pabrik-pabrik gula besar yaitu termasuk di Sidoarjo. Wilayah Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di bagian Utara, Selat Madura di Timur, Kabupaten Pasuruan di bagian Selatan, dan Kabupaten Mojokerto di bagian Barat. Sidoarjo juga

dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya. Kawasan ini termasuk kawasan industri.

Sidoarjo merupakan kota industri. Sektor industri ini berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Surabaya, dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda. Di samping itu Sidoarjo memiliki sumber daya manusia yang produktif, kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo.

Industri yang paling banyak di Sidoarjo adalah industri gula. Hal ini dimaksud dengan banyaknya pabrik gula yang masih beroperasi, seperti Pabrik Gula Watoetoelis, Pabrik Ula Candi, Pabrik Gula Kremboong, Pabrik Gula Toelangan yang sampai saat ini memiliki ijin beroperasi. Pabrik gula merupakan salah satu industri terpenting di Indonesia. Pabrik Gula Watoetoelis pertama kali didirikan oleh perusahaan milik Belanda yang bernama NV Cooy dan Coster Van Hout pada tahun 1838, yang kantornya berada di Surabaya.¹ Industri gula di Indonesia terbentuk mulai pada abad ke-17, ketika VOC mengusahakan sekitar seratus perkebunan di Batavia. Ketika VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, pemerintahan Hindia Belanda lebih giat untuk meningkatkan penanaman tebu dan ekspor gula dalam rangka menyusutkan sistem *culturstelsel*.²

Gula merupakan suatu komoditas perdagangan internasional yang memberikan suatu devisa atau keuntungan besar bagi pemilik modal dan negara.³ Pada mulanya Pabrik Gula Watoetoelis dikelola oleh pihak Belanda, namun dalam pelaksanaannya Belanda cenderung mengeksploitasi tanah dan tenaga kerja. Industri perkebunan gula juga digambarkan sebagai struktur hierarki dan represif yang sengaja diciptakan oleh penguasa perkebunan.

Sistem hierarki tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan kaum pemilik modal dan melanggengkan mekanisme eksploitasi untuk menekan biaya produksi semurah mungkin. Dalam perjalanannya industri perkebunan gula di Hindia-Belanda tidak berjalan dengan lancar, industri ini baru berkembang pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Dalam perjalanan industri ini juga mengalami pukulan yang teramat besar yaitu ketika terjadinya kemerosotan pasar pada tahun 1830an.⁴

Pada kedatangan Jepang di Indonesia, industri gula tidak beroperasi bahkan cenderung

diabaikan karena pihak Jepang tidak menitik beratkan pada kebutuhan komoditi ekspor, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Hal itu mengakibatkan industri-industri gula banyak yang tutup dan dialihfungsikan sebagai tempat produksi pangan.

Pada masa Indonesia merdeka tahun 1945 pabrik gula banyak yang tidak beroperasi karena digunakan oleh para gerilyawan Indonesia baik sebagai tempat bergerilya maupun menyimpan senjata dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pasca perang kemerdekaan, Indonesia mulai membangun perekonomian nasional. Pabrik-pabrik bekas peninggalan pemerintahan Hindia-Belanda mulai banyak yang beroperasi kembali.

Pada akhir demokrasi parlementer tahun 1957 keamanan dan politik dalam negeri memburuk sehingga mendorong terjadinya inflasi.⁵ Memburuknya kondisi keamanan politik ini menyebabkan peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali, sehingga keadaan perekonomian Indonesia juga memburuk.⁶

Perubahan penting dan mendasar dalam bidang politik di Indonesia pada kurun waktu 1959 hingga 1960 ternyata telah mempengaruhi pola kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi antara lain adanya perubahan struktur politik, dari sistem Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin, penancangan ekonomi terpimpin, dan perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Sumber kebijakan pada periode demokrasi terpimpin adalah Deklarasi Ekonomi.⁷

Terbentuknya deklarasi ekonomi sebagai dasar, pemerintah untuk melaksanakan usaha pemilihan modal secara langsung dengan jalan mengambilalih perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia. Proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan itu berlangsung sejak Desember 1957, yang dikenal dengan proses nasionalisasi perusahaan asing.

Nasionalisasi adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara, biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi pemerintah melakukan tindakan terhadap perusahaan asing. Pabrik Gula Watoetoelis yang mulanya dimiliki N.V.Cultuur Mij. Watoetoelis menjadi milik pemerintah Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia agar dapat menghilangkan apa yang dikenal sebagai ekonomi kolonial. Didalamnya terkandung gagasan untuk membebaskan ekonomi Indonesia dari ketergantungan yang besar pada sektor pertanian dan ekspor bahan mentah, agar menciptakan sistem perekonomian yang lebih seimbang.⁸

¹ *Sejarah Dan Perkembangan Pabrik Gula Watoetoelis*, Administratur PG Watoetoelis, Sidoarjo, 2013, hlm. 1.

² Mubyanto, *Masalah Industri Gula Di Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1982), hlm. 3.

³ Bisuk Siahaan, *Indonesia Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Setir*, (Jakarta : Pustaka Data, 1996), hlm. 6.

⁴ Mubyarto, dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial-Ekoomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991.

⁵ Marwati Djoened, Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia ± 1942-1998*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010).

⁶ *Ibid*.

⁷ Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2005).

⁸ Marwati Djoened, Poesponegoro, dkk, op.cit, hlm. 102.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjelaskan mengenai proses terjadinya nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo 1958, dan perkembangan Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo pasca nasionalisasi 1958.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang mengkaji tentang “Nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo 1958” penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu: Langkah awal yang dilakukan yaitu heuristik. Merupakan metode yang digunakan dalam penulisan sejarah dengan mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan “Nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Tahun 1958” yang berupa beberapa sumber tertulis yaitu Peraturan Pemerintah, lembar negara, surat kabar, buku dan majalah. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran sumber lainnya melalui arsip di ANRI, BAPEDA Surabaya dan studi pustaka di Perpustakaan UNESA, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Melalui tahap ini penulis memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Data Perkembangan dan Sejarah Pabrik Gula Watoetoelis, dari Administratur PG Watoetoelis.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959, tentang penentuan perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
- 3) Surat keputusan menteri pertanian nomor 229/Um tahun 1957. Nasionalisasi semakin lengkap saat peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 dikeluarkan. Peraturan itu menetapkan bahwa semua pedagang asing di luar ibu kota, provinsi, karesidenan, dan kabupaten diseluruh Indonesia harus ditutup selambat-lambatnya 1 januari 1960.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Lembar Negara No. 5 tahun 1959.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1958, tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dan masih banyak lagi data yang telah diperoleh.

Langkah kedua yaitu kritik. Kritik terhadap sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Sumber diseleksi dan dinilai kredibilitasnya, sehingga diperoleh data sebagai suatu fakta sejarah. Dalam mengidentifikasi data atau sumber yang berupa buku,

surat kabar diadakan uji keasliannya, tahun diterbitkannya agar dapat di pahami jarak atau waktu peristiwa dengan di tulisnya data atau sumber yang telah ditemukan. Contohnya saja buku Mubyanto dan Daryanti yang berjudul Gula Kajian Sosial-Ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1991 yang dalam buku ini dijelaskan tentang terjadinya proses nasionalisasi yang jatuh pada tahun 1958. Sumber ini memberikan data yang falit karena data tersebut sesuai dengan Lembar Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 1958. Data tersebut juga dicocokkandengan Peraturan Pemerintah sebagai pembanding.

Langkah ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini sejarawan mencari hubungan antara berbagai fakta yang telah ditemukan kemudian menafsirkannya.⁹ interpretasi ini dilakukan dengan cara menyusun fakta-fakta yang telah diperoleh secara kronologis dari dokumen terbitan resmi pemerintah, sumber koran sejaman dan buku-buku hasil penelitian terdahulu. Fakta-fakta tersebut kemudian di analisis sehingga pada akhirnya dapat dilakukan penafsiran tentang penelitian “Nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo 1958”.

Tahap terakhir ini merupakan suatu langkah dalam penulisan sejarah dalam historiografi . Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.¹⁰ Pada langkah ini fakta-fakta yang sudah dipilah-pilah akan disusun secara sistematis, dan berdasarkan kausalitas dan kronologis sehingga tersusun sebuah cerita sejarah dan hasil rekonstruksi berdasarkan data dan fakta yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dilaksanakannya Nasionalisasi

Alasan yang melatar belakangi dilaksanakan Nasionalisasi pada Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo adalah perekonomian dalam negeri yang berubah, semula pemerintah Indonesia masih menjalankan sistem ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional. Karena pada tahun 1950-an perekonomian Indonesia telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang telah beroperasi sejak pemerintah Hindia-Belanda berkuasa di Indonesia.

Alasan ini telah sesuai dengan tujuan dari Kemerdekaan, yakni memiliki keinginan untuk mewujudkan segala sesuatu yang mengenai kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Upaya-upaya dalam merealisasikan dari tujuan tersebut, maka pertama-tama

⁹ Aminuddin Kasdi, op.cit, hlm. 11.

¹⁰ Nugroho Notokusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kotemporer*, (Jakarta : Idayu Press, 1978), hlm. 12.

yang harus dirubah adalah sistem perekonomian nasional. Bangsa Indonesia telah cukup lama menggunakan sistem perekonomian kolonial yang telah membuat semua masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan kehidupan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah artikel yang di tulis oleh Dalimunthe dengan judul *Tentang Nasionalisasi* dalam sebuah majalah Berita Ekonomi, sebagai berikut:

“Satu-satunya jalan menuju kepada kemakmuran rakyat sebagai kehendak dan tujuan dasar Pancasila negara kita ialah dengan jalan menempuh jalan nasionalisasi dalam artian merobah susunan perekonomian sekarang ini yang tidak nasional menjadi nasional. Perubahan ini berarti berpindahnja perusahaan-perusahaan, tjabang-tjabang produksi dari tangan bangsa asing menjadi milik bangsa Indonesia seluruhnya. Dengan nasionalisasi belum berarti kita sudah makmur, tetapi bertilah sudah membuka pintu menuju kepada tjita-tjita kemakmuran. Mengerti akan tujuan penting inilah menjebabkan tidak seorang pun rakyat Indonesia yang ingin hidup senang dan hidup makmur, tjinta tanah air dan bangsa, yang menolak adanya nasionalisasi.”¹¹

Para pemimpin politik Indonesia menyadari bahwa kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan dan belum ada perubahan pasca kemerdekaan, mendorong para pemimpin memiliki tekad yang kuat dalam merubah keadaan dengan memajukan pengusaha-pengusaha pribumi. Pemerintah sangat memperhatikan upaya memajukan pengusaha pribumi untuk menekan kekuasaan kolonial terhadap sektor-sektor penting di Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik Asing banyak yang dinasionalisasi, salah satunya adalah pabrik gula Watoetoelis.

Nasionalisasi pabrik gula Watoetoelis ini merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk membangun perekonomian nasional yang terpadu karena semua sektor-sektor usaha di Indonesia adalah hak milik pribumi, sehingga semua perusahaan nasional harus dikelola dan didominasi oleh kaum pribumi.¹² Kebijakan ini dicetuskan karena tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangan orang-orang Belanda yang telah mengeruk semua kekayaan dan keuntungan yang teramat besar sejak masa Kolonial hingga pada awal-awal kemerdekaan. Perbuatan kaum Kolonial ini telah menyakiti masyarakat dan juga para pemimpin pemerintahan karena ketidak sesuain dan bertolak belakangnya dengan tujuan kemerdekaan.

¹¹ Dalimunthe, *Tentang Nasionalisasi*, (Jakarta : Berita Ekonomi ,September 1952), hlm. 1.

¹² Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. (Jakarta : Pustaka sinar harapan, 2001), hlm. 04.

B. Pengambil Alihan Aset Oleh Negara

Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo pada awalnya adalah sebuah pabrik yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. NV Cooy dan Coster Van Hout adalah pendiri perusahaan gula tersebut. Kepemilikan ini berakhir pada tanggal 11 Desember 1957. Bukti yang menunjukkan bahwa Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo tersebut adalah sebelumnya milik Belanda yaitu tercantum dalam lampiran Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Undang-undang No. 86 tahun 1958 yang berisi 7 pasal dan Lembar Negara Republik Indonesia No. 31 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Pertanian/Perkebunan milik Belanda pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959, tentang penentuan perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dalam lampirannya menyebutkan bahwa no. 194 Pemilik perusahaan yaitu N.V Cultuur Mij “Watoetoelis”, dimana tempat kedudukannya Kerajaan Belanda, Nama perusahaan perkebunannya Watoetoelis, memiliki jenis dalam perusahaan gula, dan pabriknya terletak di Sidoarjo.

Proses nasionalisasi atau pengambil alihan pabrik ini diawali dengan melakukan berbagai cara. Langkah-langkah pertama yang dilakukan dimulai sejak tahun 1951 dengan melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan secara politis. Akibat dari itu defisit anggaran belanja semakin besar. Masalah ini menambah persoalan ekonomi Indonesia dalam priode 1951-1955.¹³

Persoalan ekonomi ini ditandai dengan tingkat produksi gula Indonesia untuk tahun 1952 dan 1953 masing-masing berada pada tingkat 60% dan 80% dari tingkat produksi tahun 1938.¹⁴ Perkembangan Indonesia yang masih menekankan aspek politik, termasuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda untuk menopang kegiatan produksi. Untuk meningkatkan hasil produksi pemerintah membentuk Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI) dan Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP).

Hal ini juga dapat dilihat dalam buku Pantjar Simatupang, yang berjudul *Gula dalam Kebijakan Pangan Nasional: Analisis Historis*, berikut:

Langkah-langkah nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dimulai pada 1951 dengan membentuk Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI) yang berangotakan perusahaan-perusahaan pribumi. Dibawah naungan PPGI, dibentuk Pedagang Gula Tangan Pertama yang berfungsi sebagai penyalur gula. Kelengkapan organisasi semacam itu membuat PPGI tidak berbeda jauh dengan kartel perdagangan era NIVAS (1930-1942). Pusat penjualan memperoleh jatah penyaluran 10 persen dari total produksi nasional. Juga ada jaminan

¹³ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 83.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 84.

keuntungan dan fasilitas dari pemerintahan yang dipandang perlu agar PPGI dapat berkembang luas dan kuat sehingga mampu menandingi NIVAS yang dikuasai oleh beberapa pengusaha asing.¹⁵

Cara yang paling fenomenal dan yang paling fundamental adalah pengambilalihan semua perusahaan gula milik asing pada bulan Desember 1957. Yaitu dengan dilakukannya aksi mogok oleh para pekerja pabrik, aksi mogok tersebut dilaksanakan selama dua puluh empat jam. Akibat dari aksi pemogokan pekerja tersebut menyebabkan perusahaan Belanda mengalami kerugian besar yaitu kurang lebih seratus juta selain itu dalam aksi mogok tersebut telah membuat suatu keputusan dalam mengahiri hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah artikel yang berjudul *Belanda Dirugikan Rp. 100 Djuta Lebih Akibat mogok total 24 jam*. Yaitu:

“... 3 Desember, menurut perhitungan modal Belanda yang dimogoki selama 24 jam kemarin di seluruh Indonesia telah menderita kerugian sebanyak Rp.100 djuta lebih.

Aksi mogok terhadap perusahaan Belanda yang dilakukan sehari kemarin itu berjalan dengan lancar dan tentera. Sekalipun bank-bank Belanda yang masih mempunyai peranan besar dalam kegiatan-kegiatan perdagangan, tapi pemogokan kemarin itu tidak berpengaruh pada kegiatan-kegiatan perdagangan pada umumnya.

Sementara itu semalam sebelum pemogokan umum terhadap modal Belanda ini dilantarkan sidang istimewa. Suatu sumber yang cukup mengetahui diperoleh keterangan bahwa sidang itu telah membitarkan kemungkinan-kemungkinan dalam pemutusan hubungan Indonesia dengan Nederland.”¹⁶

Sebagai kelanjutan dari aksi mogok tersebut, rapat Dewan Menteri pada hari Kamis tanggal 5 Desember 1957 memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil alih oleh buru perusahaan itu selanjutnya akan dikuasai oleh pemerintah dan pimpinannya diserahkan kepada suatu badan pengurus, selain itu dalam sidang itu pun juga diputuskan seluruh transfer keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda dibekukan dan semua konsulat-konsulat Belanda di Indonesia ditutup, serta memulangkan pegawai-pegawainya. Hal ini sebagai mana sudah dijelaskan pada suatu artikel dalam suatu surat kabar yaitu, *Seluruh Transfer Laba/Sosial Perusahaan-Perusahaan Belanda Dibekukan, Perusahaan-perusahaan yang Dioper Buruhnya Dikuasai Oleh Pemerintah*

“... Khusus mengenai KPM untuk menjamin keamanan lalu lintas dan angkutan dalam keadaan darurat perang sekarang ini, dengan keputusan penguasa militer menteri pertahanan, KPM dioper oleh pemerintah dan pimpinannya sehari-hari diperjajakan kepada suatu panitia penguasa KPM.

Kabinet juga memutuskan mulai hari Kamis menutup konsulat-konsulat Belanda yang ada di Indonesia serta memulangkan seluruh transfer laba/sosial dari perusahaan Belanda.”¹⁷

Dewan menteri menyatakan telah mengadakan sidang khusus pada hari Kamis tanggal 5 Desember 1957 untuk membicarakan soal-soal pengoperan pimpinan beberapa perusahaan Belanda oleh buruhnya. Pemerintah mengerti, bahwa tindakan-tindakan dari berbagai lapisan masyarakat seperti termasuk di atas adalah merupakan suatu arus semangat yang telah lama mengalir dan yang wajib kita salurkan bersama-sama dan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar merupakan suatu potensi nasional yang teratur rapih dan disiplin untuk mencapai tujuan nasional kita.

Mengenai perusahaan Belanda yang baru-baru ini dioper oleh buru-buruhnya, kabinet telah memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya akan dikuasai oleh pemerintah dan pimpinannya akan diserahkan kepada suatu badan pengurus, dengan demikian berjalan terus dibawah pengawasan pemerintah.

Selanjutnya pemerintah telah memutuskan mulai hari Kamis telah menutup konsultan-konsultan Belanda di Indonesia, begitu pula memulangkan warga negara Belanda yang tidak dibutuhkan oleh Indonesia, serta seluruh transfer laba/sosial dari perusahaan Belanda dibekukan.¹⁸

Pemerintah telah menugaskan kepada Militer untuk melakukan pengambilalihan aset perusahaan seperti apa yang sudah tercantum pada Surat perintah Penguasaan Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. SP/PM/007/1957 tanggal 10 Desember 1957 tentang pengoperan pimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda. Suatu tindakan Penguasa militer melakukan pengoperan dalam arti kata untuk pengawasan dan perlindungan untuk kepentingan keamanan terhadap suatu perusahaan, tindakan ini dilakukan untuk menjamin serta menyelamatkan kelangsungan dan kelancaran ekonomi.¹⁹ Pengambilalihan dilarang kalau maksudnya sekedar merampas harta milik Belanda.

Walaupun pengoperan aset-aset perusahaan berhasil dilakukan pada tahun 1957. Namun nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo baru diberlakukan secara nasional pada tahun 1958. Sesuai dengan undang-undang nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

¹⁵ Pantjar Simatupang, Anas Rachman, dkk, *Gula dalam Kebijakan Pangan Nasional: Analisis Historis*, dalam Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 39.

¹⁶ *Harian Suluh Indonesia*, 3 Desember 1957.

¹⁷ *Harian Indonesia Raya*, 6 Desember 1957.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Harian Pedoman*, 6 Desember 1957.

C. Pengaruh Nasionalisasi Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo

1. Perubahan Sistem Manajemen

Struktur organisasi dan Sistem kepemimpinan dalam perusahaan perkebunan juga mengalami perubahan yang jauh berbeda dengan struktur organisasi dan sistem kepemimpinan ketika masih dikuasai atau dipimpin oleh Belanda. Pada masa kedudukan Belanda mereka lebih memilih para kalangan ningrat untuk dijadikan pejabat-pejabat administratif, hal tersebut dilakukan karena diketahui apabila pemegang administratif adalah para kalangan ningrat hasilnya akan lebih memuaskan.²⁰ Namun ketika pabrik ini dinasionalisasi struktur organisasi ini dihilangkan dengan tujuan tidak terjadi kesenjangan sosial yang mencolok. Pemimpin Pabrik gula Watoetoelis setelah dinasionalisasi dipimpin oleh Direksi, dalam pelaksanaan tugas-tugas Direksi telah dilaksanakan oleh seorang kuasa Direksi yang dibantu dengan tiga orang pembantu kuasa Direksi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan para pembantu kuasa Direksi bertanggung jawab kepada kuasa Direksi.

Sejak perkebunan dan pabrik-pabrik dinasionalisasikan, perusahaan perkebunan dilakukan dengan cara sistem sewa. Hal itu didasari oleh kenyataan bahwa banyak pabrik yang beroperasi, hanya sedikit pabrik gula yang memiliki tanah konsesi sendiri. Pabrik-pabrik gula yang tidak memiliki tanah konsesi menggantungkan diri pada kesediaan petani untuk menyewakan tanah-tanahnya. Pada umumnya petani tidak merasa keberatan dengan permintaan pabrik gula tersebut asalkan dengan pertimbangan bahwa tingkat harga sewa tanah sebanding dengan hasil yang diperoleh apabila tanah tersebut ditanami padi.²¹

2. Kondisi Ekonomi Buruh dan Petani Gula

Dampak positif yang dapat dirasakan setelah nasionalisasi adalah kesejahteraan para kaum buruh, yang pada masa pranasionalisasi kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil sangat terabaikan, akan tetapi setelah nasionalisasi perusahaan Belanda kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil secara tidak langsung dan perlahan-lahan menunjukkan adanya suatu peningkatan terhadap penghasilannya. Secara otomatis hal tersebut

menunjukkan bahwa perekonomian kaum buruh beranjak ke arah yang lebih baik yaitu dari perekonomian yang buruk menjadi perekonomian yang stabil.²²

Perekonomian yang stabil ini berdasarkan sistem gaji yang diterapkan pemerintah untuk para petani dan para pekerja, sistem yang diterapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria setelah nasionalisasi adalah sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil ini memiliki dua macam yang dikenal sebagai sistem SK 3 dan SK 4. Perbedaan kedua sistem ini adalah dalam SK 3 pabrik tetap berlaku sebagai penyewa tanah, sedangkan pada sistem SK 4 petani pemilik tanah harus menanam dan mengelola sendiri tanaman tebu.²³

Kedua sistem tersebut petani pemilik tanah memperoleh imbalan secara bagi hasil sebagai pengganti uang sewa. Imbalan tersebut sebagian besar diberikan dalam bentuk uang dan sebagian kecil dalam bentuk gula natura untuk konsumsi keluarga petani.

Ketentuan dalam sistem bagi hasil menurut SK 4 (setelah mengalami penyempurnaan) menetapkan petani memperoleh 25% gula dan pabrik gula memperoleh 75%. Sedangkan pada sistem SK 3, petani memperoleh bagian gula pasir 60% dan pabrik 40%. Sebagian besar gula petani dibeli oleh pemerintah dengan harga yang tidak merugikan. Gula yang diterima petani baik pada SK 3 maupun SK 4 (setelah penyempurnaan) adalah sebesar 3 ku/ha per KK dengan maksimum 75 kg.²⁴ Namun dalam pelaksanaannya, sistem bagi hasil tidak dapat berjalan lancar sehingga pada tahun 1966-1967 pabrik gula kembali menerapkan sistem sewa.

Untuk menghindari sistem sewa, juga untuk kemandirian produksi gula sekaligus untuk memperbaiki pendapatan petaninya pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan inpres no. 9 tahun 1975 tepatnya pada tanggal 22 April 1975, mengenai TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).²⁵

Pada tahun berikutnya telah di kembangkan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah artikel yang menjelaskan bahwa setelah nasionalisasi dikembangkan sebuah sistem Kerja Sama Operasional (KSO) yang di dalamnya telah diatur tentang pembagian imbalan kepada para petani dan pekerja. Sebagai berikut:

²²Nur Kusuma Ningsing, *Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Kopi Ngangkah Pawon di Kesiri Tahun 1956-1960*, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2005).

²³Mubyanto dan Dryanti, log. cit, hlm. 16

²⁴*Ibid*, hlm. 16.

²⁵Inpres no. 9 tahun 1975

²⁰ Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 92.

²¹Mubyanto dan Dryanti, *Gula : Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Adiya Media, 1991).

“...Terdapat dua macam KSO, yaitu KSO pengolahan lahan dan KSO pengadaan bahan baku tebu giling. Dalam KSO jenis pertama, pada awal kerjasama dengan pabrik gula petani menerima IPL (Imbalan Penggunaan Lahan) senilai 80 ku (kwintal) gula yang diperoleh per hektar selanjutnya petani pemilik lahan berkerjasama dengan pabrik gula mengelola lahannya untuk ditanami tebu atas biaya pabrik gula. Pabrik gula menjamin produksi minimal 80 ku gula per hektar, dan seandainya produktivitas per hektar tidak mencapai 80 ku maka risiko ditanggung pabrik gula. Sebaliknya apabila produktivitas per hektar mencapai lebih dari 80 ku, petani berhak memperoleh 25 persen dari kelebihanannya dan hal itu berlaku pula untuk KSO di lahan sawah, sedangkan KSO lahan tegalan IPL yang berhak diterima petani senilai 8,5 ku hingga 12 ku per hektar.

Pada KSO jenis kedua, pabrik gula memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, biaya garap, atau tebang maupun pengangkutan tebu. Besarnya bantuan tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan petani serta penilaian pabrik gula. Pada saat panen, petani menerima bagian gula setelah dipotong jumlah bantuan pabrik dan ditambah besarnya bunga sekitar 1,5 persen per bulan.²⁶

Program KSO mempunyai kemiripan dengan sistem sewa, namun ada beberapa perbedaan prinsip. Pertama, pada sistem sewa petani tidak terlibat dalam proses produksi, sedangkan dalam program KSO keterlibatan petani dalam proses produksi cukup tinggi. Kedua, dalam sistem sewa tidak ada hak petani untuk menerima kelebihan produksi, sedangkan dalam program KSO petani menerima 1/4 kelebihan batas produksi.²⁷

Kestabilan perekonomian ini juga dilandasi dengan banyaknya para pekerja baik buruh tani maupun buruh pabrik yang mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka lebar akibat dari kekosongan posisi yang telah ditinggalkan oleh para pekerja asing. Selain itu juga banyaknya para pekerja yang bergabung dengan Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo, hal ini secara perlahan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Para pekerja yang bergabung pada pabrik gula Watoetoelis ini kebanyakan berasal

dari wilayah sekitar pabrik namun tidak menutup kemungkinan juga banyak mengundang para tenaga kerja dari luar daerah pabrik. Hal ini disebabkan karena pada saat itu pabrik sangat kekurangan tenaga ahli dari wilayah sendiri, sehingga harus mengambil tenaga dari luar pabrik gula Watoetoelis. Maka dapat dilihat dari bahwa sebagian besar yang menduduki jabatan staff kantor dan pemimpin pada umumnya berasal dari luar wilayah sekitar pabrik, dan begitu sebaliknya kebanyakan pekerja yang berasal dari sekitar pabrik bekerja sebagai pekerja kasar.

Namun dengan seiring berkembangnya penduduk yang cukup besar dan kenyataan bahwa beras merupakan makanan pokok bagi hampir seluruh penduduk, menyebabkan kebijaksanaan pangan lebih berfokus pada upaya meningkatkan produksi padi.²⁸ Hingga menyebabkan berkurangnya petani yang mau menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu.

3. Hasil Produksi Pasca Nasionalisasi

Sejak terjadinya nasionalisasi pada pabrik gula Watoetoelis pada tahun 1958 industri gula mengalami keterpurukan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan dengan menurunnya hasil produksi, penurunan hasil produksi ini terjadi karena kurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu juga terlihat dalam perkembangan produksi yang berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh situasi politik dalam negeri yang kurang stabil pada masa itu.²⁹

Ketidakstabilan politik yang terjadi didalam negeri mengakibatkan memuncaknya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang memberotak. Ketegangan ini sangat memerlukan pengeluaran yang cukup besar sehingga dapat menciptakan inflasi yang nantinya akan berdampak negatif terhadap kegiatan produksi. Selain itu juga semakin meningkatnya jumlah konsumsi gula di dalam negeri, yaitu pada tahun 1957 sebanyak 420 ribu ton, dan 724,8 ribu ton pada tahun 1967. Maka sejak tahun 1967 itu tingkat konsumsi gula dalam negeri sudah melebihi tingkat produksinya, serta juga terjadi penurunan terhadap produktivitas tebu dan pada saat yang bersamaan luas area perkebunan tebu juga tidak menunjukkan adanya peningkatan yang berarti.

Turunan produktivitas terlihat dari rendahnya produksi gula per hektar (ton gula/ha). Ini berakibat langsung berupa rendahnya pendapatan

²⁶ Kompas, 29 Oktober 1991

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Imam Churmen, *Gula Taruhan Nasib Petani Tebu dan Industri Pertanian*, (Jakarta: Pustaka Wirausaha Muda, 2000), hlm. 18.

²⁹ Mubyarto, dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial-Ekoomi*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1991), hlm. 15.

petani tebu. Produktivitas yang menurun ini disebabkan oleh antara lain³⁰:

- 1) Semakin menyempitnya lahan potensial bagi tanaman tebu, hingga tebu terdesak ke lahan *marginal* yang jauh dari pabrik gula, berproduktivitas rendah, dan biaya tebang angkut tinggi.
- 2) Tertundanya awal musim tanam karena pencairan kredit kepada petani tebu terlambat, sehingga mengakibatkan pemasakan tebu tidak optimal pada saat dipanen.
- 3) Penentuan bibit varietas unggul dari kebun bibit berjenjang kurang diperhatikan lagi, pemupukan yang tidak tepat waktu, penebangan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada analisa pemasakan tebu, cara penebangan yang tidak sesuai standar baku, sangat mempengaruhi kualitas tebu dan produktivitas.
- 4) Peran pabrik gula sebagai PKOL (Pimpinan Kerja Operasional Lapangan) kurang berjalan dengan optimal.

Pabrik gula Watoetoelis adalah salah satu perusahaan yang menjadi bagian ekonomi terpenting bagi Jawa Timur pada umumnya dan Sidoarjo khususnya. Sejak dinasionalisasi pada tahun 1958 pabrik ini telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Dalam produksi yang dihasilkan oleh perusahaan hanya sebagian kecil yang dapat terpenuhi.

Tabel 2.
Luas Area Perkebunan, Hasil Produksi, dan Jumlah Konsumsi Gula

Tahun	Luas (Ribu Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Konsumsi (Ribu Ton)
1957	71,5	828,5	665,9
1958	76,2	774,6	710,0
1959	77,2	855,7	723,9
1960	72,7	675,4	715,2
1961	73,2	626,7	590,9
1962	84,2	588,8	584,6
1963	83,5	652,0	386,0
1964	88,2	650,0	550,0
1965	87,4	740,0	578,0
1966	79,5	606,6	574,9
1967	83,9	658,5	724,8
1968	76,3	612,0	730,2
1969	75,2	550,9	801,0

Sumber: Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka, Data dan Ulasan BPS Surabaya.

Apabila kita lihat tabel 2 diatas maka kita dapat mengetahui jika perkembangan produksi gula mengalami penurunan yang sangat drastis, dalam artian tiap tahun produksi gula di Jawa Timur mengalami penurunan. Ini merupakan apabila komoditi gula merupakan jenis komoditi

yang mengalami penurunan dalam perkembangan produksinya.

KESIMPULAN

Nasionalisasi merupakan suatu langkah awal dalam perbaikan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang pada awalnya telah menganut perekonomian Kolonial, namun semenjak adanya nasionalisasi perekonomian Indonesia berubah menjadi perekonomian nasional.

Perubahan perekonomian ini dilakukan dengan tujuan menghapus semua kekuasaan orang-orang Barat khususnya Belanda dalam mengatur semua sistem ekonomi di Indonesia.

Nasionalisasi ini dilakukan dengan alasan untuk membentuk perekonomian yang lebih baik, mendapatkan keadilan dan keamanan di dalam negeri, serta adanya inflasi karena adanya pemogokan para buru-buru pabrik. Proses nasionalisasi ini mengalami perjalanan yang cukup panjang.

Pada awalnya proses nasionalisasi ini dilakukan sejak tahun 1951 dengan membentuk Pusat Penjualan Gula Indonesia (PPGI) Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP) sebagai penyalur gula. Pada tahun 1957 namun langkah yang paling fenomenal dalam nasionalisasi pabrik gula ini adalah dengan adanya keadaan nasional yang memburuk karena adanya sikap radikal dengan melakukan aksi mogok selama 24 jam, guna memperoleh keadilan. Akibat dari mogok tersebut Belanda mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebanyak 100 juta lebih. Akibat dari peristiwa ini Pabrik Gula Watoetoelis Sidoarjo berhasil diambilalih. Dan pada tahun 1958 nasionalisasi ini telah disahkan dan diberlakukan secara nasional bersamaan dengan dikeluarkannya undang-undang nasionalisasi tahun 1958.

Nasionalisasi telah membuat penguasa pemerintah telah memiliki peningkatan yang pesat dalam perekonomian nasional. Namun dalam peningkatan perekonomian nasional yang pesat tidak diiringi dengan perkembangan produksi gula. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program terencana dan persiapan yang matang selain itu kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian perusahaan. Akibatnya adanya penurunan dalam produksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Terbitan resmi Pemerintah

Lembar Negara Republik Indonesia. No, 39, 1958

Lembar Negara Republik Indonesia. No, 40, 1958

Lembar Negara Republik Indonesia. No, 31, 1959

Peraturan Menteri Perburuan No. 3 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959, tentang penentuan perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

³⁰ Imam Churmen, op.cit, hlm. 77.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959.

peraturan pemerintah no. 30 tahun 1960 tentang perusahaan dagang milik belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi.

B. Buku

Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta : Pustaka sinar harapan, 2001.

Booth, Anne, at.al. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1988.

Imam Churmen, *Gula Taruhan Nasib Petani Tebu dan Industri Pertanian*, Jakarta: Pustaka Wirausaha Muda, 2000.

Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta : LP3ES, 1986.

Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.

Mubyarto, dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial-Ekoomi*. Yogyakarta : Aditya Media, 1991.

Mubyanto,dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Mubyanto, *Masalah Industri Gula Di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1982.

C. Surat Kabar

Berita Ekonomi, Oktober 1952.

Berita Ekonomi, Oktober 1952.

Berita Ekonomi, 1953.

Berita Ekonomi, 1953.

Harian Pedoman, 6 Desember 1957.

Harian Suluh Indonesia, 28 Desember 1958.

Indonesia Raya. Djum'at, 6 Desember 1957

